

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan ialah Penentangan Tiongkok Terhadap Korea Selatan Dalam Pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan tahun 2016, yaitu jurnal oleh Habiburrahman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau. Penelitian ini mendeskripsikan penentangan Tiongkok terhadap pengadaan THAAD di Korea Selatan, dan bagaimana implikasinya terhadap Tiongkok.

Dalam penelitian ini THAAD dengan kemampuannya yang begitu canggih menjadi ancaman tersendiri bagi Tiongkok. Radar THAAD dikhawatirkan dapat menembus territorial Tiongkok dan menemukan data alutsista Tiongkok. Dalam penelitian ini juga membahas posisi Tiongkok yang mendukung denuklirisasi semenanjung Korea. Tekanan yang diberikan Tiongkok kepada Korea Utara akan menimbulkan potensi bahaya. Namun apabila Tiongkok membiarkan hal tersebut akan mengakibatkan Korea Selatan memiliki kedekatan lebih dengan Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut yang membuat Tiongkok menentang adanya THAAD di Korea Selatan.¹⁶

Penelitian selanjutnya berjudul Penolakan Korea Selatan untuk Bergabung ke dalam Sistem Pertahanan Rudal Amerika Serikat di Asia Timur, yaitu jurnal oleh

¹⁶ Habiburrahman, "Penentangan Tiongkok Terhadap Korea Selatan Dalam Pengadaan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Di Korea Selatan tahun 2016", dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2, (Oktober 2017).

Dewi Permatasari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Penelitian ini menjelaskan Korea Selatan sebagai mitra penting Amerika Serikat dalam memperkuat aliansi kerjasama pertahanan rudal di kawasan Asia Timur yang telah dibentuk oleh Amerika Serikat dan Jepang sejak tahun 2006. Amerika Serikat membentuk suatu pertahanan rudal balistik trilateral antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, dan berupaya untuk menempatkan sistem pertahanan anti rudal THAAD di Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan telah menyepakati dan menandatangani berbagai kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat tersebut, namun Korea Selatan telah menyatakan penolakannya untuk bergabung ke dalam sistem pertahanan anti rudal Amerika Serikat di Asia Timur. Keputusan Korea Selatan tersebut adalah di dasarkan pada faktor internal yakni berupa tuntutan masyarakat dan kelompok kepentingan politik yang ada di Korea Selatan. Serta faktor eksternal yakni keikutsertaan Korea Selatan dalam Sistem Pertahanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat tersebut akan berpengaruh buruk bagi hubungan bilateral antara Cina dan Korea Selatan.¹⁷

Penelitian lainnya yang memiliki relevansi dalam pembahasan adalah *Chinese Views on South Korea's Deployment of THAAD* oleh Michael D. Swaine dari Hoover Institution. Dalam penelitian ini Tiongkok menentang adanya THAAD karena x-band radarnya yang canggih namun sangat mengkhawatirkan. THAAD menciptakan kecurigaan Tiongkok terhadap tindakan AS yang mungkin memata-

¹⁷ Dewi Permatasari, "Penolakan Korea Selatan Untuk Bergabung Ke Dalam Sistem Pertahanan Rudal Amerika Serikat Di Asia Timur" *Journal Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman*, 2016.

matai Tiongkok. Tiongkok khawatir arah politik Korea Selatan semakin tertuju pada Amerika Serikat, dan Jepang sehingga berjalan berjauhan dengan Tiongkok.¹⁸

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Maka dalam melakukan pengamatan dan menganalisis masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan sangat dibutuhkan dalam penulisan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan. Kerangka acuan ini ditopang oleh pendapat pakar yang berkompetensi dalam bidang kajian yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis agar analisis yang dilakukan tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam memahami suatu masalah serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menganalisis objek penelitian.

1. Teori Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang pada tahun 1930. Ilmu ini berkembang terutama di Amerika Serikat dan Inggris, hal itu

¹⁸ Michael D. Swaine, "Chinese Views on South Korea's Deployment of THAAD", Hoover Institution, Washington, D.C. 2 Februari 2017.

dikarenakan aspek-aspek yang membahas hubungan antar negara dianggap penting sebagai upaya untuk tercapainya perdamaian dunia pada saat itu.

The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara.¹⁹ Interaksi aktor atau anggota masyarakat yang terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional. Interaksi-interaksi tersebut dapat berupa politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara.

Mochtar Ma'soed mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antar aktor internasional, yaitu sebagai berikut:

Hubungan internasional juga didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu - individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.²⁰

Menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe dalam buku *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Hubungan Internasional adalah:

Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi antara Negara-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tantara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah Negara-negara tersebut tidak lepas dari *balance of power* (perimbangan

¹⁹ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu. Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 4

²⁰ Mochtar Mas'oeed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, 1994), hlm. 28.

kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan *world order* (keteraturan tata dunia) dan diplomasi yang *prudence* (hati-hati).²¹

Berdasarkan pengertian tersebut maka hubungan internasional tujuannya untuk melihat bagaimana perilaku aktor dalam interaksi internasional, yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, perang dan konflik. Hubungan internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Seperti halnya penentangan Tiongkok dalam hal pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan diperlukan dasar untuk menjelaskan perilaku kedua aktor yang mempengaruhi pola interaksi kedua negara tersebut.

2. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara dan proses sebuah negara dalam memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton dalam buku *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa:

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.²²

Politik Luar Negeri berisi tujuan suatu negara, cara mencapai tujuan, dan cara mengelola sumber daya alam agar negara dapat bersaing dengan negara-negara lain. Politik Luar Negeri merupakan langkah negara dalam mengambil tindakan berdasarkan kondisi internasional. Dalam hal ini pengadaan *Terminal High Altitude*

²¹ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power (Terjemahan Mercedes Marbun) Jakarta: Putra A. Bardin, hlm. 24

²² Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, (Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin) Bandung, 1999) hlm 155.

Area Defense merupakan tindakan politik luar negeri Korea Selatan dan menimbulkan respon terhadap Tiongkok.

3. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar dalam memahami perilaku internasional suatu negara. Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam mengejar *power* untuk dapat mengembangkan kekuasaan atas negara lain. Menurut Donald E. Nuechterlin sedikitnya menyebutkan empat jenis dimensi kepentingan nasional, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan yang terakhir kepentingan ideologi.²³

Hans J Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

Kepentingan nasional sebagai *power* (pengaruh, kekuasaan dan kekuatan) atau kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.²⁴

Kepentingan nasional juga sebagai tujuan fundamental yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur

²³ Dinda Arumsari, "Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional", web.unair.ac. (Online), 30 September 2014 dalam [http://dinda-arumsari-laksono-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112185-\(SOH101\)%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html](http://dinda-arumsari-laksono-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112185-(SOH101)%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html), diakses pada 31 Maret 2018.

²⁴ Coloumbus, Theodore A. and James H. Wolfe. 1981. "Introduction to International relations, Power, and Justice. New Delhi: Prentice Hall of India".

yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.²⁵

Dari definisi diatas kepentingan nasional merupakan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional. Seperti dalam penelitian ini bahwa pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan tidak lepas dari kepentingan nasional negara Korea Selatan dalam dimensi kepentingan pertahanan.

4. Keamanan Nasional

Konsep keamanan merupakan salah satu kajian penting dalam studi Hubungan Internasional. Pada hakikatnya keamanan nasional merupakan kepentingan nasional paling penting bagi setiap negara. Menurut Richard Ullman keamanan adalah hal yang berkaitan dengan keberadaan ancaman dimana ancaman ini dipandang sebagai sesuatu hal atau peristiwa yang menantang serta mengganggu stabilitas suatu negara dan instrumennya.²⁶

Menurut Lawrence Ziring keamanan nasional dimaknai dengan pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koersif yang digunakan suatu negara dalam

²⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal 11

²⁶ Richard, H. Ullman, *Redefining Security, International Security Vol. 8 No. 1*, (Summer, 1983) hlm. 15-21.

mencapai kepentingan-kepentingannya.²⁷ Hal ini mengarah bahwa konsep keamanan terkait dengan ancaman penggunaan kekerasan dalam konteks militer di dalam menyelesaikan konflik yang ada.

Sedangkan Glenn H Synder lebih menekankan pada pentingnya tujuan utama dari keamanan nasional yaitu untuk menangkal (*deter*) serangan musuh dan mempertahankan (*defense*) diri dari serangan musuh yang dapat terjadi dengan kerugian seminimal mungkin.²⁸

“Essentially deterrence means discouraging the enemy from making action by posing for him a prospect of cost and risk which outweighs his prospective gain. Defence means reducing our own prospective cost and risk in the even that deterrence fail. Deterrence works on the enemy’s constitution: the deterrent value of military enemy moves. Defence value of military forces is their effect in mitigating the adverse consequences for us of possible enemy moves, whether such consequences are counted as losses of territory or war damage..

*Perhaps the crucial difference between deterrence and defence is that deterrence is primarily a peacetime objective while defence is a war time value. Deterrence value and defence value are directly employed in different time periods”.*²⁹

Menurut Frank N. Trager dan F.N. Simonis keamanan nasional memiliki arti:

*“The Preservation of a war of life acceptable to the people and compatible with the needs and legitimate aspiration of others. It includes freedom from military attack or coercion, freedom from internal subversion and freedom from the erosion of the political, economic and social values which are essential to the quality of life”.*³⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keamanan adalah kemampuan sebuah negara untuk melindungi negaranya dari ancaman yang mungkin merusak stabilitas keamanan negara tersebut. Keamanan juga berkaitan soal upaya negara dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Berkaitan

²⁷ Lawrence Ziring, *International Relations: A Political Dictionary* (Abc-Clio Inc; Subsequent edition (December 1, 1995). hlm. 205.

²⁸ O Robert J Art dan Kenneth N. Waltz, *The Use of Force International Politics and Foreign Policy*, (Boston: Brown CO. 1971), hlm. 56-57.

²⁹ Douglas J. Murray and Paul R. Viotti, Op Cit, hal. XVIII

³⁰ Barry Buzan, *People, States and Fear, An Agenda for International Security Studies In The Post-Cold War Era*, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, Great Britain, 1991, hal. 17.

dengan hal ini Korea Selatan melakukan upaya dalam menjaga stabilitas negaranya dan berusaha mencapai kepentingan nasionalnya melalui pengadaan *Terminal High Altitude Area Defense*.

5. Konsep *Security Dilemma*

Konsep *security dilemma* merupakan sebuah aksi dan reaksi antar negara, ketika suatu negara meningkatkan keamanannya maka akan dianggap melemahkan negara lain dan menimbulkan reaksi dari negara tersebut. Menurut Robert Jervis *Security dilemma* terjadi akibat kegagalan saat mengintrepetasikan masing-masing perilaku Negara karena ketakutan akan perubahan postur militer Negara lain.

Herbert Butterfield menjelaskan *security dilemma* kedalam aspek berbeda, yaitu:

- (1) Kondisi anarki (*lack of a higher unity*) sebagai sumber utamanya;
- (2) Kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian dan ketakutan atas potensi antar negara untuk melakukan kejahatan;
- (3) Negara-negara mencoba keluar dari *dilemma keamanan* secara *self-help* dengan mengakumulasi terus-menerus kekuatannya (*power*), yang mendorong terciptanya siklus kompetisi kekuatan;
- (4) Akumulasi kekuatan tersebut ternyata tidak serta-merta meningkatkan keamanan negara (bahkan cenderung terjadinya hal-hal tragis);
- (5) Factor psikologikal dapat memperkeruh *dilemma keamanan*; serta

(6) Merupakan pendorong terjadinya semua konflik yang terjadi antar umat manusia.³¹

Konsep security dilemma dalam skripsi ini digunakan untuk menganalisa

6. *Economic Statecraft*

David A. Baldwin menjelaskan dalam *Economic Statecraft* bahwa *statecraft* didefinisikan sebagai *the art of conducting state affairs*. *Statecraft* juga didefinisikan sebagai aksi yang terencana dari negara untuk mengubah *external environment* baik kebijakan ataupun perilaku negara lain sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh *policy makers*.³²

Dengan adanya unsur *power*, maka *statecraft* dimaksud untuk memenuhi kepentingan yang dimiliki negara. *Economic Statecraft* digambarkan sebagai usaha-usaha pemerintah untuk memberikan pengaruh dengan cara-cara yang memiliki unsur sumber daya (*resources*) yang memiliki nilai ekonomis.³³

Baldwin menjelaskan bahwa *economic statecraft* didefinisikan sebagai:³⁴

1. *Emphasizes means rather than ends, economic statecraft* lebih menekankan maksud dari pada hasil akhirnya.
2. *Economic statecraft does not restrict the range of goals that may be sought by economic means*, secara empiris fakta yang tidak

³¹ Shiping Tang, "Theory of security Strategy for Our Time" (Palgrave MacMillan; 2010), hal. 35

³² David A Baldwin, 1985, *Economic Statecraft*, New Jersey:Princeton University, hal. 8-9.

³³ Ibid, hal. 6.

³⁴ Ibid hal. 39-40.

terbantahkan bahwa para pengambil kebijakan sering menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan yang lebih luas dari tujuan ekonomi.

3. *Economic statecraft treats policy instruments as property concept, thus facilitating the maintenance of a clear distinction between undertakings and outcomes*, negara memperlakukan instrumen kebijakan sebagai *property concept* sehingga memudahkan untuk pemeliharaan perbedaan antara usaha dengan hasil.
4. *Economic statecraft* memasukkan definisi ekonomi, sehingga dapat membedakan antara teknik ekonomi dan yang bukan.

Baldwin juga membagi *economic statecraft* kedalam dua kategori, yaitu *negative sanction* (contohnya: embargo) dan *positive sanction* (contohnya: *tariff discrimination*). Secara sederhana ia membedakan bahwa *positive sanction* didefinisikan sebagai sanksi yang memberikan atau menjanjikan kepada negara target dengan *reward*, sedang *negative sanction* didefinisikan sebagai sanksi yang akan memberikan atau mengancamnya dengan *punishment*.

Francesco Giumelli mengembangkan penelitian Baldwin, Art dan Haas, Baldwin menjelaskan tujuan *Economic Statecraft* adalah untuk menjelaskan bagaimana *state* menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politiknya, Art menjelaskan *forces* sebagai alatnya dan Haas menjelaskan bagaimana konflik diartikulasikan. Sehingga Baldwin membuat instrumen

kebijakan luar negeri menjadi 4 kategori yaitu propaganda, diplomasi, *economic statecraft*, dan *military statecraft*.³⁵

Selanjutnya Giumelli menjelaskan 2 asumsi dasar, yaitu *faktor feasibility* dan *direct material impact*. Faktor *feasibility*, jika suatu sanksi layak (*feasible*) maka target tahu apa yang harus dilakukan dan dapat melakukannya karena permintaan tersebut tidak membahayakan keberadaannya. Di sisi lain, jika permintaan tersebut tidak dapat diterima oleh target, maka tujuan dari sanksi tidak akan mengubah perilaku target. Kelayakan permintaan didasari oleh dua dimensi: ketepatan yaitu apakah target mengerti apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kehendak pengirim (*sender*), dan kepraktisan (*practicality*) yaitu apakah permintaan tersebut dapat dipenuhi oleh target tanpa mengorbankan keberadaannya. Faktor kedua adalah *direct material impact*, kurang signifikannya dampak yang ditimbulkan tidak berarti bahwa pengirim tidak memiliki kemauan politik untuk secara efektif memainkan peran dalam krisis. Faktor tersebut dibentuk oleh *cost of sanction* (biaya sanksi) dan *dependence* (ketergantungan) terhadap sumber daya yang ditolak oleh sanksi misalnya.

Adapun variable dasar *Economic Statecraft* adalah sebagai berikut: ³⁶

³⁵ F Giumelli, *Coercing, Constraining and Signalling*, 2011. ECPR Press. Hartanto, Toton. 2013. "Inisiatif Keamanan Perdagangan Dalam Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Amerika Serikat", JURNAL BPPK ISSN 2085-3785 Volume 6 Nomor 2, dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/jurnal?download...jurnal-bppk-volume-6...2013> . Diakses pada 8 April 2017.

³⁶ David A Baldwin, 1985, *Economic Statecraft*, New Jersey: Princeton University, hal. 39-40 dalam Hartanto, Toton. 2013. "Inisiatif Keamanan Perdagangan Dalam Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Amerika Serikat", JURNAL BPPK ISSN 2085-3785 Volume 6 Nomor 2, dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/jurnal?download...jurnal-bppk-volume-6...2013> . Diakses pada 8 April 2017.

Threat to Sender Variabel *threat* mengacu pada tingkat ancaman yang diidentifikasi oleh pengirim. Semakin tinggi *threat against sender*, semakin tinggi komitmen *sender* untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya.

Salience adalah *degree of importance* yang melekat pada isu yang aktor buat. *Salience* dari sebuah isu dapat dikorelasikan dengan tingkat ancaman, tetapi mengacu pada pentingnya krisis untuk alasan yang tidak langsung terkait dengan kelangsungan hidup pengirim. Dengan kata lain, krisis yang menonjol mungkin tidak menimbulkan ancaman bagi pengirim, dan ancaman mungkin tidak menonjol karena *salience* tidak diukur dalam keamanan tradisional

Complexity of Dispute *Complexity of Dispute* merupakan variable yang digunakan untuk menggambarkan tingkat *intractability* krisis, dan variabel sistem yang memiliki kekuatan penjas dalam kebijakan luar negeri sebagai interest menjadi *incompatible*, karena itu, sender dan target masuk ke dalam *zero-sum game*, di mana keterlibatan dapat dipertimbangkan ketika peluang menang tinggi dan *interest* dipertaruhkan. Konsekuensinya sanksi dapat diterapkan untuk menghilangkan musuh, untuk menghindari intervensi dalam daerah yang bahaya atau untuk mengejar beberapa keuntungan.

Dapat disimpulkan bahwa *economic statecraft* menjelaskan bagaimana negara melakukan kebijakan ekonomi sebagai upaya lanjutan suatu kebijakan politik dalam mengejar *national interest*. Dalam hal ini Tiongkok memberikan *negative sanctions* terhadap Korea Selatan terkait pengadaan *Terminal High Altitude Air Defense*, merupakan bentuk *economic statecraft*.

7. *The Sanctions Paradox*

The Sanction Paradox merupakan buku dari Daniel Drezner yang berisi — *the Conflict Expectations Model* dari *sanctions behaviour*. Model dimaksudkan untuk membantu memprediksi apakah "pengirim" akan menggunakan sanksi ekonomi untuk mengambil konsesi dari "target" dan apakah target akan mengakui atau menolak. Dalam buku ini menjelaskan bagaimana negara mempertimbangkan ancaman pemaksaan ekonomi (*economic coercion*) dibandingkan dengan alat kebijakan lainnya.

Economic statecraft includes the use of inducements as well as sanctions. In the public perception, economic sanctions are associated with trade-disrupting measures. The definition of economic coercion includes cases of economic sanctions ...which is not commonly thought of as a sanctions case.

Drezner menyebutkan bahwa *Economic Statecraft* merupakan sebuah konsep yang berisi bujukan maupun sanksi. *Economic sanctions* merupakan tindakan yang mengganggu langkah perdagangan. Sedangkan *economic coercion* merupakan sebuah sanksi ekonomi namun didalamnya dapat berisi paksaan dengan sanksi atau hal-hal paksaan yang biasanya tidak dikatakan sebagai sanksi.

Ada beberapa alasan mengapa sanksi ekonomi digunakan. Pertama, sanksi adalah instrumen politik non-militer dan non-kekerasan, menjadi alternatif yang lebih disukai. Kedua, sanksi lebih murah daripada intervensi militer, tetapi, pada saat yang sama masih merupakan alat pemaksa. Ketiga, meskipun sanksi jelas bertujuan untuk mendorong perubahan politik di negara target, yang akan menyiratkan bahwa pengirim terlibat dalam apa yang bisa dibilang urusan internal,

meskipun sanksi mungkin tidak berhasil membawa perubahan politik yang diinginkan, mereka masih bisa memaksa para pemimpin negara target untuk memperhitungkan biaya sanksi internasional dalam perhitungan mereka ketika memutuskan kebijakan masa depan. Selain itu, sanksi internasional dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan negara target.

Namun pada saat yang sama para ahli menemukan bahwa sebagian besar kasus sanksi gagal, dan disitulah *The sanction paradox* muncul. Ketika negara memutuskan apakah akan melakukan *economic coercion* maka negara harus mempertimbangkan tentang biaya langsung dan manfaat dari penerapan sanksi, negara juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya konflik politik di masa depan dengan negara target.

Ketika memberikan sanksi ekonomi penting untuk mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh pengirim. Pengirim biasanya tidak mau memberikan sanksi kecuali kesenjangan biaya penerapan sanksi besar. Kerugian yang dialami target harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh pengirim. Oleh karena itu, negara-negara akan menggunakan paksaan ekonomi ketika biaya intervensi militer terlalu besar.

Tabel 1 *The predicted pattern of economic coercion*

	<i>Minimal Conflict Expectation</i>	<i>Heightened Conflict Expectations</i>
<i>Large gap in</i>	<i>Significant concession</i>	<i>Moderate concession</i>
<i>Small gap in costs</i>	<i>No coercion attempt</i>	<i>Minor concession</i>

*Most studies have assumed that the objectives of economic sanctions were to return to the status quo that prevailed prior to the act of aggression which brought the sanctions about. In reality, the aims of sanctions have been consistently less ambitious.*³⁷ Hal tersebut merupakan pernyataan yang salah. Jika negara yang ditargetkan tidak mengubah kebijakannya sama sekali, maka sanksi tersebut dinilai gagal. Namun, jika ada kompromi, dan nilai konsesi melebihi biaya pemaksaan pengirim, maka hal tersebut dianggap sebagai keberhasilan sebagian. Tingkat keberhasilan juga tergantung pada jenis tuntutan. Setelah hal ini terpenuhi maka sanksi ekonomi akan bermanfaat.

Menurut Baldwin, *a moderate degree of success in accomplishing a difficult task may seem more impressive than a high degree of success in accomplishing an easy task. In assessing statecraft, as in judging diving contests, scores should be adjusted for the level of difficulty.*³⁸

Table 2 Existing approaches to economic coercion

	<i>Domestic politics</i>	<i>Signaling</i>
<i>Causes of coercion attempt</i>	<p>1. <i>Domestic pressure on the sender regime</i></p> <p>2. <i>Lack of palatable alternatives</i></p>	<p>1. <i>Desire to signal future actions</i></p>

³⁷ Daoudi dan Dajani, 1983, *Economic Sanctions: Ideals and Experience*. 1983, Boston: Routledge and Kegan Paul. Hal. 2.

³⁸ David A Baldwin, *Economic Statecraft*, New Jersey:Princeton University, 1985, hal. 372.

<i>Causes of coercion outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ability of target regime to use sanctions to its own political advantage 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cost of the signal to the sender 2. Implicit threats of power projection or military force 3. Ability of the sender country to attract multilateral cooperation
<i>Coercion is more likely to be attempted if:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The potential sender is a democracy 2. The target is geographically distant from the sender 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No predicted pattern
<i>Coercion is more likely to generate concessions if:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The target regime is domestically unstable 2. Sanctions hurt the target elites as much as the general population 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The sanctions are costly to the sender 2. Military force is also threatened or used 3. The sender attracts international cooperation

Dalam hal ini sanksi akan lebih digunakan ketika pengirim sudah tidak bisa melakukan tindakan yang lebih persuasive. Pengirim juga menggunakan paksaan ekonomi ketika biaya intervensi militer terbilang besar. Jika target secara fisik lebih kuat, maka sanksi lebih disukai daripada kebijakan militer. Asumsi teori ini adalah factor internasional membatasi rejim pengirim untuk bertindak lebih keras. Dalam hal ini tujuan sanksi lebih ditekankan kepada hasil untuk faktor domestik yang lebih baik.

8. Konsep Respons

Respons adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respons) terhadap rangsangan atau stimulus.³⁹ Sedangkan menurut Soekanto respons sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu.⁴⁰ Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa respons merupakan tanggapan atau jawaban atas sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dan merangsang timbulnya suatu perilaku.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut: **“Dengan adanya ancaman spionase dan stabilitas keamanan kawasan dalam pengadaan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan, maka Tiongkok**

³⁹ Sarlito Wirawan Sarwino, 1995, *Psikologi Lingkungan*, Jakarta: Grasindo.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 328.

memberikan respon penentangan berupa penutupan gerai lottemart, penentangan korean wave, pemotongan rute penerbangan dan pelarangan wisata”

2.4 Operasional Variable dan Indikator

Untuk membantu dan menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi oprasional variabel dan indikator konsep hipotesis di atas yaitu:

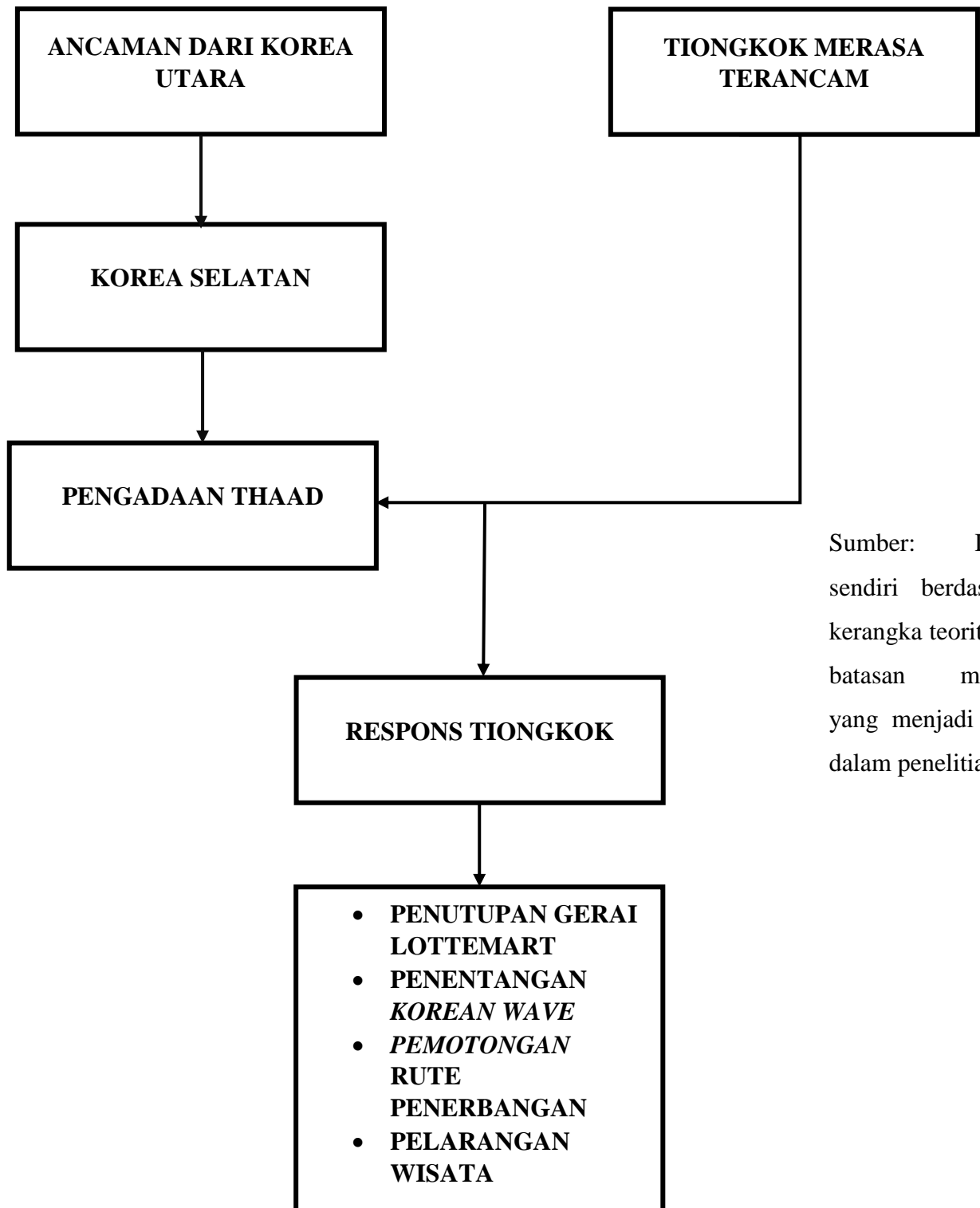
Tabel 3 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Dengan adanya ancaman spionase dan stabilitas keamanan kawasan dalam pengadaan <i>Terminal High Altitude Area Defense</i> di Korea Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan 2. Ancaman THAAD kepada Tiongkok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Terminal High-Altitude Area Defense system</i> (THAAD) dirancang sebagai upaya mempertahankan diri dari ancaman Korea Utara. http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39189535 2. Sistem THAAD memata-matai Tiongkok https://www.suara.com/news/2017/05/03/045630/cina-takut-sistem-thaad-mata-matai-wilayahnya
Variabel Terikat: maka Tiongkok memberikan respons penentangan berupa penutupan gerai lottemart, penentangan <i>Korean wave</i> , pemotongan rute penerbangan dan pelarangan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tiongkok menentang pengadaan THAAD Korea Selatan 4. Tiongkok memberikan hukuman kepada Korea Selatan. 5. Penutupan Gerai Lottemart 6. Penentangan <i>Korean Wave</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tiongkok Menentang Pengerahan Sistem Pertahanan Misil di Korsel https://www.voaindonesia.com/a/Tiongkok-menentang-pengerahan-sistem-pertahanan-misil-di-korsel/4017155.html 4. Tiongkok memberikan hukuman kepada Korea Selatan https://dunia.tempo.co/read/870011/protes-amerika-soal-thaad-cina-hukum-korea-selatan 5. Tiongkok Boikot Lotte Mart http://www.mediaindonesia.com/re

	<p>7. Pemotongan Rute Penerbangan Tiongkok-Korea Selatan</p> <p>8. Pelarangan Wisata Tiongkok ke Korea Selatan</p>	<p>ad/detail/94785-tiongkok-boikot-lotte-mart diakses pada 8 Mei 2018.</p> <p>6. Pelarangan Drama Korea Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20161123154153-220-174776/pelarangan-drama-korea-di-china-mulai-berdampak • https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20161122224557-220-174576/netizen-korsel-sambut-positif-pelarangan-drama-korea-di-china <p>7. Airlines cut flights between S Korea, China over THAAD http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2017/03/11/2003666569</p> <p>8. China melarang agen travel menjual paket wisata ke Korea Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.nytimes.com/2017/03/08/world/asia/china-south-korea-economy.html • https://www.voaindonesia.com/a/larangan-wisata-china-terkait-thaad-berdampak-di-korea-selatan/3788587.html
--	--	---

2.5 Skema Kerangka Teoritis

Gambar 1 Skema dan Alur Penelitian



Sumber: Diolah sendiri berdasarkan kerangka teoritis dan batasan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian